



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki laju urbanisasi tertinggi dan telah dihadapkan pada permasalahan kawasan permukiman kumuh yang jumlahnya meningkat cukup cepat. Berdasarkan data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS, proporsi rumah tangga kumuh di perkotaan telah menurun sebesar 8,18% dari 20,75% pada tahun 1993 menjadi 12,57%. Pada tahun 2011. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa laju rata-rata penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 0,50% per tahun. Tanpa suatu terobosan yang berarti maka, upaya mewujudkan kota bebas kumuh pada tahun 2020 akan sulit dicapai. ¹

Sama halnya dengan semua kota kota besar yang ada di Indonesia, perkembangan Kota Pekanbaru semakin pesat. Akibatnya, pertumbuhan penduduk per tahunnya pun ikut meningkat. Tercatat saat ini jumlah penduduk Pekanbaru sudah mencapai 1,1 juta jiwa atau pertumbuhannya mencapai 4,47 persen. Meski begitu, dari angka tersebut hanya 2 persen akibat kelahiran, sementara 2,47 persen pertumbuhan penduduk akibat masyarakat pendatang. Memang kita tidak pungkiri, Pekanbaru sudah menjadi sentra perekonomian saat ini. Tahun ini pertumbuhan penduduk mencapai 4,47 persen. Untuk pertumbuhan ini tidak didominasi oleh kelahiran, tapi justru pendatang yang paling banyak mempengaruhi jumlah penduduk Pekanbaru. ²

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat mempunyai dampak terhadap berbagai bidang antara lain di bidang fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang secara umum akan bersifat susul menyusul dengan laju

¹Data susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS,2011

²Data pertumbuhan penduduk kota pekanbaru



pertumbuhan penduduk. Kurang tersedianya sarana dasar ini akan mengakibatkan tumbuhnya beberapa bagian wilayah perkotaan menjadi kawasan kumuh. Kawasan yang kumuh sering diidentikkan dengan kawasan yang kotor dengan masalah atau kemiskinan kota.

Kelurahan Sri Meranti sebagai salah satu bagian dari kota pekanbaru tak luput dari permasalahan kawasan kumuh ditambah lagi secara geografis wilayah ini berada ditepian atau berbatasan langsung dengan sungai siak dan juga sebagian wilayahnya terletak di jalur lintas yang mengakibatkan Kelurahan Sri Meranti sangat berpotensi mengalami bencana banjir tercatat sudah beberapa kali daerah ini dilanda banjir akibat meluapnya sungai siak, kondisi jalan yang tidak banyak rusak akibat dari banjir, kondisi drainase yang belum sesuai standar, keluhan masyarakat selama ini sebab sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari, banyak nya sampah yang bertumpukan sebagai dampak dari kurangnya tempat-tempat pembuangan sampah, pengelolaan limbah yang kurang baik, dan kondisi bangunan yang padat dan sempit yang rawan terhadap kebakaran serta susah nya mobil pemadam kebakaran untuk terjun kewilayah tersebut, dan dikarenakan di Kelurahan Sri Meranti terdapat sebuah pabrik menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan udara segar. Hal ini ditambah ditetapkannya Kelurahan Sri Meranti sebagai salah satu daerah yang dilakukan pembangunan kawasan kumuh hal ini dibuktikan melalui SK (Surat Keputusan) dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di Indonesia. Kawasan kumuh umumnya di hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi kawasan kumuh ini. Mulai dari program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengentasan kemiskinan yang di anggap sebagai penyebab utamamunculnya kawasan kumuh hingga program-program yang lebih bersifat spesifik. Pemerintah pusat mencoba menangani permasalahan ini dengan meluncurkan skema program P2KP, P2KKP, sampai dengan program PNPM-Mandiri yang kesemuanya dilaksanakan dengan pola BKM (Bantuan Langsung kepada Masyarakat). Sebagian dari program program ini ada yang telah berjalan dengan baik namun sebagian yang lain belum mencapai hasil yang optimal.

Melihat dari permasalahan yang telah dipaparkan pemerintah kota pekanbaru kembali mengeluarkan beberapa program untuk mengatasi masalah permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Sri Meranti ini salah satunya yaitu melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merujuk kepada peraturan presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi yang menjadi “*platform*” kolaborasi atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan



berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.³

Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah melakukan tahapan-tahapan dari perencanaan yang dimulai dari indikasi penataan lingkungan permukiman dengan 7 indikator.

1. Kriteria Jalan Lingkungan
2. Kriteria Penyediaan Air Bersih
3. Kriteria Drainase
4. Kriteria Pengelolaan Air Limbah
5. Kriteria pengolahan Persampahan
6. Kriteria Pengaman Kebakaran
7. Ruang Terbuka Publik

Dari latar belakang yang telah dijabarkan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DALAM PEMBANGUNAN KAWASANKUMUH DI KELURAHAN SRI MERANTI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU ”**

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam judul ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah diantaranya :

1. Implementasi

Pengertian implementasi dalam Kamus Pintar Bahasa Indonesia (KPBI) diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan.⁴ dan menurut para ahli, Lester dan Steward Jr. juga mengungkapkan bahwa

³http://www.p2kp.org/pustaka/files/modul2/peldas2016/Paparan%20kebijakan%20KOTAKU/SE_DJCK_No_40_2016_KOTAKU.pdf (diakses 1 maret 2017)

⁴ Hamid, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua),189.



implementasi sebagai salah satu proses dan suatu hasil (*output*).⁵ jadi dapat diartikan bahwa implementasi adalah suatu penerapan atau penerapan dari suatu program ataupun kebijakan yang dikeluarkan.

2. Program KOTAKU

suatu program pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan suatu kawasan yang layak huni. Jadi yang dimaksud adalah suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh.

3. Pembangunan Kawasan Kumuh

Menurut Galtung Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.⁶ Sedangkan kawasan kumuh Menurut UU No. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.⁷ lalu dapat penulis simpulkan bahwa pembangunan kawasan kumuh adalah suatu aktifitas atau upaya yang dilakukan agar tercapainya kawasan yang bersih dan bebas dari kata kumuh.

⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar kebijakan public*, (Bandung: alfabeta), 2014, 189.

⁶ Trijono, Lambang, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 3.

⁷ UU No. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Program Kotaku Dalam Pembangunan Kawasan Kumuh Di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang Implementasi Program Kotaku Dalam Pembangunan Kawasan Kumuh Di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menjadi dua manfaat yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis yakni :

a. Manfaat Praktis

- 1) Kegunaan penelitian ini sebagai syarat untuk lulus sebagai Sarjana Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan program pemecahan masalah sosial di masyarakat terutama dalam hal penangan kawasan kumuh.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya setelah ini.
- 2) Memberikan informasi bahwa pemerintah telah melakukan suatu upaya dalam menangani kawasan kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru.
- 3) Sebagai penulis secara khusus penelitian ini untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan.



E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini terstruktur dan terarah maka penulis proposal yang akan dilanjutkan dengan skripsi ini nantinya akan dibagi atas 6 bab yang terdiri dari sub-sub yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan kerangka teoritis, konsep, operasional dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan lokasi penelitian, sumber data, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PROGRAM KOTAKU

Pada bab ini penulis menyajikan gambaran umum program KOTAKU.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Dan pada bab terakhir ini peneliti menyajikan kesimpulan dan saran dari peneliti